

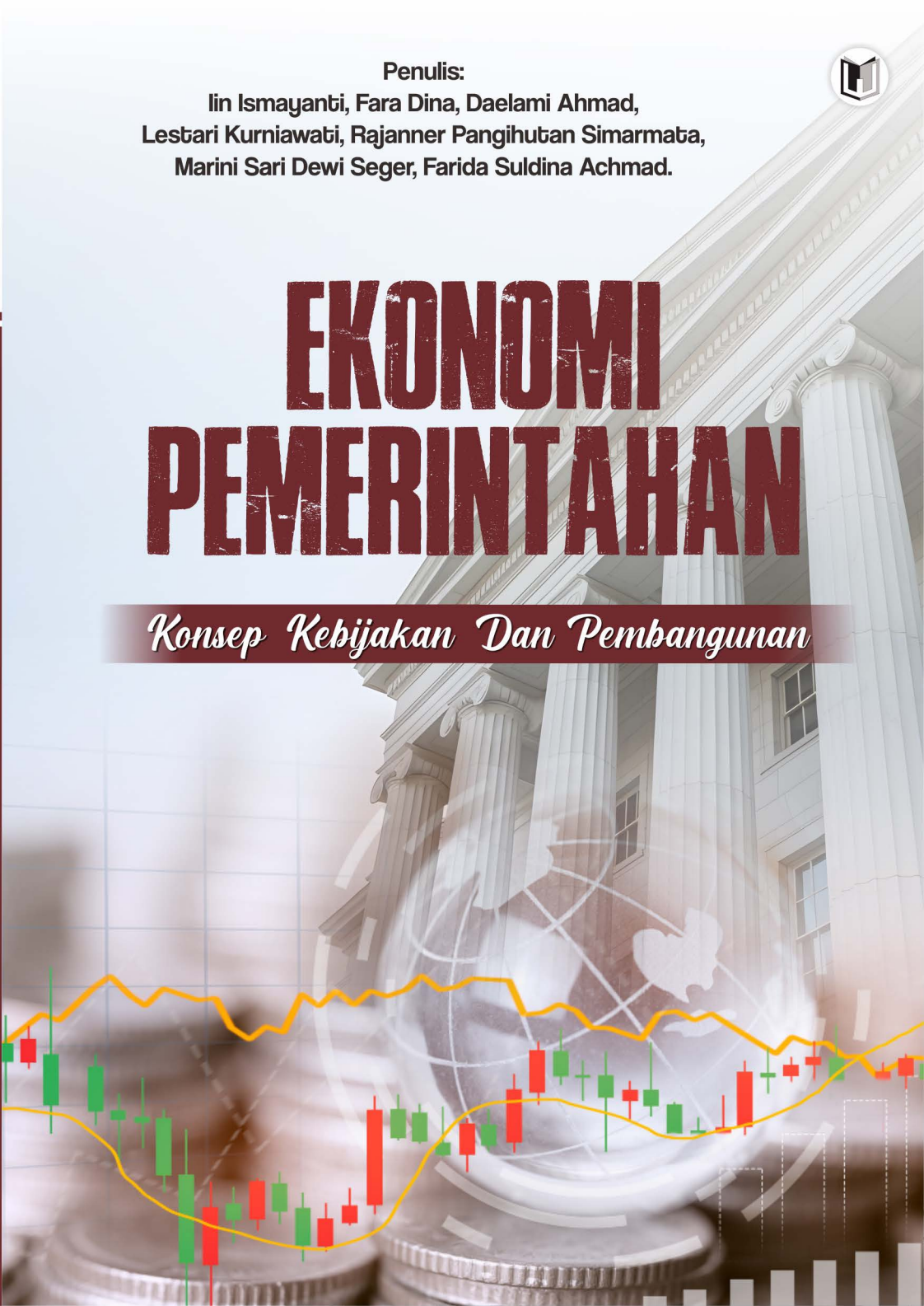
Penulis:

Iin Ismayanti, Fara Dina, Daelami Ahmad,
Lestari Kurniawati, Rajanner Pangihutan Simarmata,
Marini Sari Dewi Seger, Farida Suldina Achmad.



EKONOMI PEMERINTAHAN

Konsep Kebijakan Dan Pembangunan



EKONOMI PEMERINTAHAN

Konsep Kebijakan Dan Pembangunan

Penulis:

Iin Ismayanti, Fara Dina, Daelami Ahmad,
Lestari Kurniawati, Rajanner Pangihutan Simarmata,
Marini Sari Dewi Seger, Farida Suldina Achmad.



EKONOMI PEMERINTAHAN KONSEP, KEBIJAKAN, DAN PEMBANGUNAN

Penulis:

**Iin Ismayanti, Fara Dina, Daelami Ahmad, Lestari Kurniawati,
Rajanner Pangihutan Simarmata, Marini Sari Dewi Seger, Farida Suldina Achmad.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-634-317-199-7

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Ekonomi Pemerintahan: Konsep, Kebijakan, dan Pembangunan* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu referensi yang membahas hubungan antara pemerintah dan perekonomian dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan kebijakan publik, serta tantangan pembangunan yang semakin kompleks, pemahaman mengenai ekonomi pemerintahan menjadi sangat penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi pemerintahan merupakan cabang ilmu yang mempelajari peran pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan aktivitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, serta pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ekonomi pemerintahan menjadi bekal yang penting bagi mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan ekonomi.

Buku ini disusun secara sistematis agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai berbagai aspek ekonomi pemerintahan. Pembahasan dimulai dari konsep dasar ekonomi pemerintahan dan sistem perekonomian, dilanjutkan dengan pengelolaan keuangan negara, pembangunan ekonomi daerah, pelayanan publik dalam perspektif ekonomi, pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan, hingga pembahasan mengenai globalisasi ekonomi, krisis ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan strategi penguatan ekonomi nasional. Setiap bab disusun dengan pendekatan

teoritis dan aplikatif sehingga dapat membantu pembaca memahami keterkaitan antara kebijakan pemerintah dengan pembangunan ekonomi.

Selain menyajikan landasan konseptual, buku ini juga mengulas berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah dalam mengelola perekonomian di era modern. Pembahasan mengenai otonomi daerah, kemandirian fiskal, transparansi pengelolaan keuangan, transformasi digital dalam pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam memberikan wawasan yang relevan dengan perkembangan kebijakan publik saat ini. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu menganalisis berbagai tantangan ekonomi pemerintahan secara lebih komprehensif dan objektif.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah, praktisi kebijakan publik, serta seluruh pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai ekonomi pemerintahan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan mengenai kebijakan ekonomi publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

September, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI PEMERINTAHAN	1
A. Pengertian Ekonomi Pemerintahan	1
B. Ruang Lingkup Ekonomi Pemerintahan	6
C. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian	11
D. Tujuan Ekonomi Pemerintahan	16
E. Rangkuman Materi	21
BAB 2 SISTEM PEREKONOMIAN DAN PEMERINTAH	27
A. Pengertian Sistem Perekonomian	27
B. Sistem Ekonomi Kapitalis	32
C. Sistem Ekonomi Sosialis	33
D. Sistem Ekonomi Campuran	34
E. Rangkuman Materi	35
BAB 3 KEUANGAN NEGARA	39
A. Pendahuluan	39
B. Pengertian Keuangan Negara	42
C. Sumber Pendapatan Negara	49
D. Pengeluaran Negara	56
E. Pengelolaan Keuangan Negara	61
F. Akuntabilitas Dan Kesejahteraan Publik	66
G. Rangkuman Materi	72
BAB 4 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	79
A. Pendahuluan	80
B. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah	82
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemandirian Fiskal	86
D. Otonomi Daerah dan Ekonomi	90
E. Ketimpangan Pembangunan Daerah	93
F. Rangkuman Materi	97

BAB 5 PELAYANAN PUBLIK DAN EKONOMI	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Konsep dan Paradigma Pelayanan Publik.....	106
C. Pelayanan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Publik	110
D. Hubungan Pelayanan Publik dan Pembangunan Ekonomi.....	113
E. Good Governance, Transformasi Digital, dan Pelayanan Publik	117
F. Tantangan dan Prospek Pelayanan Publik di Indonesia	123
G. Rangkuman Materi	127
BAB 6 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS EKONOMI PEMERINTAHAN	133
A. Pendahuluan.....	133
B. Transparansi Pengelolaan Keuangan.....	134
C. Pengawasan Keuangan Negara	136
D. Akuntabilitas Pemerintahan	142
E. Pencegahan Korupsi Ekonomi	147
F. Rangkuman Materi	149
BAB 7 INDONESIAN GOVERNMENT ECONOMIC	155
A. Globalisasi Ekonomi.....	155
B. Krisis Ekonomi dan Peran Pemerintah	158
C. Definisi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	160
D. Strategi Penguatan Ekonomi Nasional	163
E. Rangkuman Materi	164
GLOSARIUM	167
PROFIL PENULIS	185



BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI PEMERINTAHAN

Iin Ismayanti, S.AP., M.AP
Universitas Indonesia Timur

A. PENGERTIAN EKONOMI PEMERINTAHAN

1. Konsep Dasar Ekonomi dan Pemerintahan

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, maupun negara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya tersebut menuntut adanya pengambilan keputusan yang rasional agar tercapai efisiensi dan kesejahteraan. Dengan demikian, ilmu ekonomi tidak hanya membahas aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mengkaji berbagai pilihan yang harus diambil

DAFTAR PUSTAKA

- Ahman, H. E., & Rohmana, Y. (2017). Konsep-Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. *Universitas Terbuka*.
- Djaenuri, A., & Enceng, M. S. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 49.
- Hafizah, Y. (2005). Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 31-46.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Deepublish.
- Indrawan, I. (2019). Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan pada Tataran Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 19(1), 91-98.
- Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep dasar ekonomi menurut syariat Islam. *MUAMALATUNA*, 12(1), 38-72.
- Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Meraja Journal*, 2, 101-108.
- Setiono, A., Napisah, S., Wartono, T., Suryahani, I., Sundari, S., Rahayu, S., ... & Efitra, E. (2023). *DASAR-DASAR EKONOMI: Panduan Praktis Teori dan Konsep*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Tambusay, I. B. W., Minati, I. S., Oktavia, I. A., Tanjung, I. A., Zahra, I. K., & Sari, I. P. *KONSEP DASAR EKONOMI*.
- Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). *Ekonomi Publik*. Penerbit NEM.
- Simatupang, P. (2003). *Analisis kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan*. Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.
- Pamungkas, B. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep dan Praktek berdasar Peraturan Perundangan Jilid 1*. Kesatuan Press.
- Ahmad Mustanir, S. I. P., Amame, A. P. O., Sos, S., Sofyan, M. M., Sos, S., AP, M., ... & Lopulalan, D. L. (2023). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Widina.
- Yossinomita, Y., Haryadi, H., Nainggolan, S., & Zulfanetti, Z. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Perpajakan*. Penerbit Widina.

- Aryansyah, A. F., Basri, M. H., Wardhani, R. S., Wibawa, D. P., Noviyanti, I., Sari, W. F., ... & Waradhika, N. (2025). *Dasar-dasar teori inflasi: Dari pemikiran klasik hingga Keynesian*. Penerbit Widina.
- Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda, R., ... & Maulida, A. Z. (2021). *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Penerbit Widina.



BAB 2

SISTEM PEREKONOMIAN DAN PEMERINTAH

Fara Dina, S.E., M.E.
Universitas Tanjungpura

A. PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian merupakan suatu mekanisme, aturan, serta institusi yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur kegiatan ekonomi, termasuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Dalam praktiknya, sistem ekonomi juga berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam mengendalikan stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Mankiw, NG (2021). Prinsip-prinsip ekonomi (edisi ke-9). Cengage Learning.
- Samuelson, PA, & Nordhaus, WD (2019). Ekonomi (edisi ke-20). McGraw-Hill Education.
- Sa'adah, N., Norfitria, & Setyanoor, E. (2025). Perbandingan sistem kapitalis, sosialis, dan campuran terhadap pertumbuhan ekonomi. *Kelebihan: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (2). <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1609>
- Helmayanti, Naila, E., & Setyanoor, E. (2025). Sistem ekonomi sosial campuran (Konsep, bentuk, dan variasi di negara berkembang). *Kelebihan: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (2). <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1610>
- Smith, A. (2007). Sebuah penyelidikan tentang sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa . Harriman House.
- Keynes, JM (2018). Teori umum tentang pekerjaan, bunga, dan uang . Palgrave Macmillan.
- Marx, K. (1990). Kapital: Kritik terhadap ekonomi politik . Penguin Classics.
- Helbing, D. (2013). Ekonomi 2.0: Langkah alami menuju masyarakat pasar partisipatif yang mengatur diri sendiri.
- Kato, T. (2022). Ekonomi Islam dan kapitalis: Perbandingan menggunakan model ekonofisika pertukaran dan redistribusi kekayaan.
- Leydesdorff, L. (2012). Ekonomi berbasis pengetahuan dan model Triple Helix.

Keuangan negara adalah salah satu instrumen paling menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Ia tidak hanya berbicara tentang angka, kas, pajak, belanja, atau laporan akuntansi, tetapi tentang bagaimana negara menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi warga, menyediakan pelayanan publik, membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan. Setiap sekolah yang dibangun, jalan yang diperbaiki, rumah sakit yang diperkuat, bantuan sosial yang disalurkan, hingga gaji aparatur yang dibayarkan, semuanya berhubungan dengan keputusan keuangan negara. Karena itu, keuangan negara dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.bpk.go.id/ihips>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2022). Budget transparency and financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 210–234.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0025>
- Drăcea, R. M., Pirtea, M. G., Cristea, M., Noja, G. G., & Ciobanu, L. (2024). Budget transparency and good governance for human development and citizens' well-being: New empirical evidence from the European Union. *Engineering Economics*, 35(3), 328–347. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.35.3.34024>
- Gruber, J. (2022). *Public finance and public policy* (7th ed.). New York: Worth Publishers/Macmillan Learning.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>.
- International Budget Partnership & Seknas FITRA. (2019). *Open budget survey 2019: Indonesia*. Washington, DC: International Budget Partnership.
<https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2021/12/47.-EN-Open-Budget-Survey-2019.pdf>
- International Monetary Fund. (2018). *Fiscal transparency handbook*. Washington, DC: International Monetary Fund.
<https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781484331859/9781484331859.xml>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Perbedaan pajak, PNB, dan hibah dalam APBN*. Kementerian Keuangan Learning Center.
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/perbedaan-pajak-pnb-dan-hibah-dalam-apbn-76439ff3/detail>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Informasi APBN dan kebijakan fiskal*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2020). *Public budgeting systems* (10th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Lestari, P. A. (2025). Transparency and accountability in the digital era: Insights from public sector accounting. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(3), 195–208.
<https://journal.sinergi.or.id/index.php/ijat/article/view/864>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mikesell, J. L. (2018). *Fiscal administration: Analysis and applications for the public sector* (10th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Quality budget institutions: Developments in OECD countries*. Paris: OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/quality-budget-institutions_8e811202-en/full-report.html
- PEFA Secretariat. (2025). *Global trends in public financial management performance*. Washington, DC: PEFA Secretariat.
<https://www.pefa.org/pfm-tracker-2025/en/report/global-pfm-performance/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Transparency International. (2023). *Public financial management: A guide for civil society*. Berlin: Transparency International. https://knowledgehub.transparencycdn.org/kproducts/PFM-guide_Final-draft.pdf
- World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/118cb701-cc62-5d24-9d4d-df26496ae97b>
- World Bank. (2020). *Indonesia subnational education public expenditure review 2020*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/681343d0-38fc-5d34-8736-46fb5bd41fcf>
- Aldemir, C., & Uçma Uysal, T. (2025). Artificial intelligence for financial accountability and governance in the public sector: Strategic opportunities and challenges. *Administrative Sciences*, 15(2), Article 58. <https://doi.org/10.3390/admsci15020058>
Open access: <https://www.mdpi.com/2076-3387/15/2/58>



BAB 4

Lestari Kurniawati, S.S.T., Akt., M.E.
Politeknik Keuangan Negara STAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dan pembaca diharapkan mampu:

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Arsyad, L. (2018). *Ekonomi pembangunan: Strategi pembangunan daerah dan perencanaan wilayah*. UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024: Dinamika spasial dan ketimpangan antarwilayah*. BPS RI.
- Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries*. Edward Elgar Publishing.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223–251.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2017). *Planning local economic development: Theory and practice* (6th ed.). SAGE Publications.
- Brodjonegoro, B. P. S. (2021). *Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Capello, R. (2016). *Regional economics* (2nd ed.). Routledge.
- Hill, H. (2021). *Regional development in a giant archipelagic economy: The case of Indonesia*. Routledge.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499.
- Mada, S. T. (2024). *Desentralisasi fiskal dan dinamika ekonomi daerah di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.

- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- OECD. (2024). *Subnational government in OECD countries: Key data on finance and investment*. OECD Publishing.
- Rodriguez-Pose, A. (2018). The revenge of the places that don't matter (and what to do about it). *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(1), 189–209.
- Shah, A. (2014). *The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and transition economies*. World Bank Publications.
- Siahaan, M. P. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia: Teori dan implementasi UU HKPD*. RajaGrafindo Persada.
- Sjafrizal. (2021). *Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2009). *Regional economic development: Analysis and planning strategy*. Springer.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 1–84.
- World Bank. (2024). *Indonesia economic quarterly: Boosting regional growth through infrastructure and human capital*. World Bank Group.
- World Bank. (2025). *World development report: Rethinking sub-national governance for global competitiveness*. World Bank Group.



BAB 5

PELAYANAN PUBLIK DAN EKONOMI

Dr. Drs. Rajanner Pangihutan Simarmata, M.Si
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN)

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara komprehensif hubungan antara pelayanan publik dan ekonomi dalam perspektif administrasi publik dan ekonomi publik. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai konsep, pengertian, dan paradigma pelayanan publik yang berkembang dalam ilmu administrasi publik. Selanjutnya dibahas pelayanan publik dalam perspektif ekonomi publik, termasuk peran pemerintah dalam penyediaan barang publik (*public goods*) dan upaya mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Bab ini juga menguraikan hubungan strategis antara pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, termasuk pengaruh pelayanan publik terhadap investasi, produktivitas

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Grönroos, C. (2007). *Service management and marketing: Customer management in service competition* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. Sage Publications.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Kochanova, A., Hasnain, Z., & Larson, B. (2020). Does e-government improve government capacity? Evidence from tax compliance costs, tax revenue, and public procurement competitiveness. *World Bank Economic Review*, 34(1), 101–120.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaruan.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Moenir, A. S. (2002). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Government at a glance 2024*. OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pollitt, C. (1993). *Managerialism and the public services*. Blackwell.

- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W.W. Norton & Company.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- United Nations. (2024). *UN E-Government Survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- World Bank. (2023). *World Development Report 2023: Migrants, refugees, and societies*. World Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



BAB 6

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS EKONOMI PEMERINTAHAN

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si
Universitas Nusa Cendana

A. PENDAHULUAN

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola ekonomi pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks ekonomi pemerintahan, negara tidak hanya berperan sebagai regulator perekonomian, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya publik yang bertanggung jawab atas setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk kemakmuran rakyat. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan akuntabilitas yang bermakna, pengelolaan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, dkk. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Aprianti, E. R., & Riharjo, I. B. (2017). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH . *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Barbara S Romzek, & Melvin J Dubnick. (2000). *Dynamics of Public Sector Accountability in Era of Reform*. International Review of Administrative Sciences.
- Bevir, M. (2010). Democratic governance. In *Democratic Governance*. Princeton University Press.
- BPK RI. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan dan Kinerja*.
- Caiden, G. E. (2014). *Administrative reform comes of age* (Vol. 28). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmeliikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44.
- Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral accountability and corruption: Evidence from the audits of local governments. *American Economic Review*, 101(4), 1274–1311.
- Gani, F. S., Pananrangi, A. R., Ismail, I., Provinsi, D. S., & Selatan, S. (2022). The Effect of Commitment, HR, Supervision on the Implementation of Performance-Based Budget in Social Service Department, South Sulawesi Province. In *J. Paradigma Administrasi Negara* (Vol. 4, Number 2).
- Grönlund, A., Svärdsten, F., & Öhman, P. (2011). Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden. *International Journal of Public Sector Management*, 24(2), 107–121. <https://doi.org/10.1108/09513551111109026>
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hollier, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2011). Democracy and transparency. *The Journal of Politics*, 73(4), 1191–1205.
- Jabbara, J. G., & Dwivedi, O. P. (2004). Globalization, governance, and administrative culture. *International Journal of Public Administration*, 27(13–14), 1101–1127.
- James S Bowman. (2010). *Achieving Competencies in Public Service* (second). Armonk N.Y:M.E Sharpe.
- Kearns, K. P. (1996). Managing for accountability: Preserving the public trust in public and nonprofit organizations. (*No Title*).
- Kernaghan, K. (1993). Partnership and public administration: conceptual and practical considerations. *Canadian Public Administration*, 36(1), 57–76. <https://doi.org/10.1111/j.1754-7121.1993.tb02166.x>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marshall Edward Dimock, & Gladys Ogden Dimock. (1969). *Public Administration*. Rineka Cipta.
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249.
- Olken, B. A., & Pande, R. (2012). Corruption in developing countries. *Annu. Rev. Econ.*, 4(1), 479–509.
- Perrin_- Implementing the Vision*. (n.d.).
- Peters, B. G., & Shah, A. (2007). *Performance-based accountability*.
- R.D. Behn, & P.A Kant. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*. Brookings Institution Press.
- Retnowati, E. (2012). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN). *Perspektif*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Rothstein, B. O., & Teorell, J. A. N. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*, 21(2), 165–190.

- Seger, M. S. D. (2022). Bureaucratic Accountability In The Management of The Operational Fund School (BOS) (Case Study On Elementary Education Kupang). *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(4), 504–513. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i4.1039>
- Seger, M. S. D. (2025). Etika dan Transparansi dalam Pemerintahan Daerah. In *Sistem Pemerintahan Daerah* (pp. 278–292). Widina Media Utama.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 599–617.
- Tejedo-Romero, F., & de Araujo, J. F. F. E. (2018). Determinants of local governments' transparency in times of crisis: evidence from municipality-level panel data. *Administration & Society*, 50(4), 527–554.
- Widodo, T. (2017). *Performance-based budgeting: evidence from Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:262495138>
- Yosef, B. E. (2024). The art of effective oversight: unravelling the success of Israel's Cabel Inquiry Committee. *The Theory and Practice of Legislation*, 12(1), 21–54. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2310473>



BAB 7

INDONESIAN GOVERNMENT ECONOMIC

Dr. Farida Suldina Achmad, B.Sc., B.A., M.Si.
Universitas Islam As-Syafiiyah

Content:

Chapter I: Globalisasi Ekonomi

Chapter II: Krisis Ekonomi dan Peran Pemerintah

Chapter III: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Chapter IV: Strategi Penguatan Ekonomi Nasional

A. GLOBALISASI EKONOMI

Menurut Penuis, globalisasi ekonomi merupakan proses meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara melalui perdagangan internasional, investasi asing, arus modal, teknologi, tenaga kerja, dan pertukaran informasi tanpa batas. Proses ini menyebabkan batas-batas

PROFIL PENULIS

lin Ismayanti, S.AP., M.AP



Penulis lahir di Kendari, 08 Mei 1992. Penggiat literasi ini menamatkan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Makassar tahun 2015, lulus S2 di Program Magister Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN)

Makassar tahun 2017. Saat ini adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Timur Makassar. Mengampu mata kuliah Ekonomi Pemerintahan, Etika Pemerintahan dan beberapa mata kuliah yang linier dengan studi kepakaran Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara. Anak ke-2 dari 3 bersaudara ini juga aktif di berbagai jurnal ilmiah dan organisasi. Salah satu prestasi yang pernah dia raih adalah pemenang Hibah Penelitian Kemdiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) secara berturut-turut tahun 2023, 2024 dan 2025.

Fara Dina, S.E., M.E.



Penulis lahir pada tahun 1986 dengan bidang Pendidikan Ekonomi di Universitas Tanjungpura, keaktifan dalam mengajar, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan editor jurnal, pengalaman kerja diberbagai bidang.

Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si



Dosen Tetap Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang – Banten. Lahir di Banyuwangi pada 10 Juli 1974, ia menempuh pendidikan Sarjana pada Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi di STIA YAPPAN Jakarta. Perjalanan profesionalnya dimulai 1998 sebagai dosen tetap dan pengelola administrasi sumber daya manusia di STIA Mandala Indonesia Jakarta. Sejak itu, ia terus mengabdikan diri dalam dunia pendidikan tinggi melalui berbagai amanah strategis, antara lain sebagai Wakil Ketua III STIA Banten, Ketua STIA Banten Pandeglang, Direktur Akademi AKPI Serang, Wakil Ketua II STIKes Ichsan Medical Centre Bintaro, Direktur LSP Caregiver, Direktur LKP Ichsan Medical Centre, Wakil Direktur II Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada, Wakil Rektor II Universitas Salakanagara hingga kini mengemban amanah sebagai Direktur Pengembangan dan Bisnis Universitas Salakanagara. Selain aktif di perguruan tinggi, ia juga berkhidmat sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Mandiri Cileles, Lebak, Banten. Pengalamannya tidak hanya terbatas pada dunia akademik. Ia pernah berkiprah dalam bidang penerbitan dan manajemen profesional sebagai Operation Manager, Editorial Manager, dan General Manager pada sejumlah lembaga penerbitan. Dalam organisasi, ia aktif dalam berbagai wadah pendidikan dan kemahasiswaan, antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciputat, APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Wilayah IV-B Banten, BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia) Provinsi Banten, APVOKASI (Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia), dan APPERTI (Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah Banten.

Lestari Kurniawati, S.S.T., Akt., M.E.



Penulis lahir di Magelang dan menyelesaikan pendidikan D IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2006. Penulis meraih gelar *Master of Economic* dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Penulis berkarir di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak 2002, mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Anggaran sejak 2007, sebelum beralih menjadi dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) pada tahun 2016. Di PKN STAN, penulis berkhidmat di Program Studi Manajemen Aset Publik dengan bidang pengajaran mencakup Akuntansi Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan, dan Mikroekonomi. Penulis mendalami riset pada tema-tema Akuntansi Keuangan, Ekonomi Pembangunan, dan Kebijakan Publik. Karya-karya ilmiah penulis dapat diakses melalui portal ResearchGate di <https://www.researchgate.net/profile/Lestari-Kurniawati>. Untuk korespondensi akademik, penulis dapat dihubungi melalui lestari.kurniawati@pknstan.ac.id.

Dr. Drs. Rajanner Pangihutan Simarmata, M.Si.



Penulis lahir di Pematang Siantar pada 10 Agustus 1970. Saat ini beliau merupakan Dosen Tetap sekaligus Wakil Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Jakarta. Sebelum berkarier di dunia akademik, beliau memiliki pengalaman panjang di birokrasi Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan penugasan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga sekretariat daerah. Pengalaman praktis tersebut memperkuat kompetensinya dalam bidang pemerintahan dan administrasi publik. Selain aktif mengajar, beliau juga terlibat dalam organisasi profesi, seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Indonesia (ADAKSI) dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan

Indonesia (MIPI), serta telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal akademik di bidang Ilmu Pemerintahan.

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si



Penulis adalah seorang akademisi yang mendalami Ilmu Administrasi Negara dengan latar belakang pendidikan di Universitas Nusa Cendana, baik pada jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2). Selama masa studinya, ia berfokus pada bidang-bidang utama dalam Administrasi Negara, termasuk Teori Administrasi Pembangunan, Manajemen Publik, Serta Organisasi Dan Manajemen. Saat ini, Marini berprofesi sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana. Sebagai dosen, ia tidak hanya mengemban tugas pengajaran, juga aktif dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Administrasi Publik. Melalui tulisan ini, ia berupaya mengidentifikasi solusi inovatif bagi permasalahan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan pengalaman dan dedikasi yang tinggi, Marini Sari Dewi Seger berkomitmen untuk terus mengembangkan diri sebagai akademisi dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan generasi baru administrator publik yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan di era yang semakin kompleks ini.

Dr. Farida Suldina Achmad B.Sc., B.A., M.Si



Perempuan berdarah Aceh ini sering di panggil sebagai Sensei Farida karena mengajar Bahasa Jepang *Hospitality* di Poltek Sahid Kampus Sudirman dan juga Dosen yang mengampu Mata Kuliah MSDM Pasca Sarjana Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) sebagai Dosen Homepage. Penulis juga bekerja di PT. Nippon Oil Indonesia (PT. NOID) sebagai HR Dept Head. Selain sebagai Karyawan di salah satu Perusahaan Swasta Jepang, dan juga seorang dosen, penulis merupakan Asesor yang bertugas di LSP Transforma Indonesia. Sudah

puluhan Manager SDM dan GM Level yang telah di uji oleh Penulis. Ibu dari 2 orang anak yag bernama M. Fasya Ramouza Abbas, yang mempunyai kesibukan sebagai Mahasiswa dan Atlet Panahan (Anggota Perpani) dan Aisyifa Salsa Hanabila Abbas pelajar dan Atlet Basket mempunyai hobi bukan di bidang olah raga melainkan travelling. Oleh karenanya, setelah menamatkan SMU (dan Madrasah Aliyah) di Pesantren Putri As-Syafiiyah penulis mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan *study*-nya ke negara matahari terbit untuk jenjang Diploma, Strata 1 dan Strata 2, dan dilanjutkan Strata 3 di Univeristas Negeri Jakarta (UNJ) dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Isteri dari Bapak Syarwani yag sama-sama bekerja di PMA (Perusahaan Jepang) tetapi berbeda perusahaan ini, mengisi liburan akhir pekan "*weekend*" selain mengajar juga membantu suami dalam usaha Cafe&Resto dan Mie Aceh di kawasan Bekasi-Galaxy. Juga sebagai Trainer terkait *discussion* tentang *HR Field*, karena penulis bukan hanya sebagai seorang akademisi HR melainkan juga praktisi yang bekerja di Perusahaan Asing di bidang HR lebih dari 17 tahun. Prestasi yang pernah di raih penulis selain mendapatkan beasiswa Monbusho dari Pemeritah Jepang, di Kampus homebase-nya pernah di pilih sebagai Dosen Terbaik tahun 2024 dan 2025. Buku *Chapter* Ekonomi Pemerintahan ini merupakan buku ke-7 penulis. Saat ini penulis tinggal di Kemang Pratama Bekasi dan penulis bisa dihubungi di: farida.syarwani@gmail.com



Buku ini disusun sebagai referensi komprehensif untuk memahami hubungan antara kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi. Buku ini menguraikan konsep-konsep dasar ekonomi pemerintahan, sistem perekonomian, keuangan negara, kebijakan fiskal dan moneter, perpajakan, pengelolaan anggaran, hingga berbagai instrumen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan disajikan secara sistematis dengan memadukan teori, regulasi, serta dinamika praktik pemerintahan di Indonesia.

Selain memberikan landasan konseptual, buku ini juga mengulas berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah dalam era globalisasi dan transformasi digital, seperti desentralisasi fiskal, pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, penguatan investasi, reformasi birokrasi, serta penerapan prinsip good governance. Setiap materi disusun dengan pendekatan yang aplikatif sehingga pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis implementasi kebijakan ekonomi pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam wawasan tentang ekonomi pemerintahan. Dengan bahasa yang mudah dipahami, didukung referensi mutakhir dan pembahasan yang relevan dengan perkembangan kebijakan publik, buku ini diharapkan menjadi sumber belajar yang mampu membangun pemahaman kritis serta memberikan kontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 [widina store](#)
 [widina bookstore](#)

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
 0815-7000-699



SCANME

Ekonomi & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-199-7



9

786343

171997